

ABSTRAK

Dengan adanya praktik jual beli pasir di daerah tengah pantai yang pada dasarnya jika dilihat dari sudut pandangan yang strategis tanah sudah merupakan asset yang begitu penting. Seperti proses penambangan pasir sering kali tidak sesuai dengan prosedur, daerah pantai yang dimiliki oleh Negara ini diakui milik penduduk setempat dan pasir pantainya diperjualbelikan. Melakukan penambangan pasir yang tidak sesuai dengan UU No.27 Tahun 2007 juga peraturan Presiden tentang reklamasi. Penambangan pasir tersebut dilakukan terus menerus disetiap hari meskipun hal tersebut dilakukan secara ilegal. Dikarenakan sudah terbiasa menjadi mata pencaharian warga Desa Banjar Talela. Kepemilikan lahan yang belum pasti dan takaran yang tidak jelas adalah aspek-aspek jual beli yang dilarang dalam Islam, dan hukum Negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli pasir dipantai Desa Banjar Talela dan bagaimana tinjauna Fiqih Lingkungan dan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap akad jual beli pasir di pantai Desa Banjar Talela. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang akad jual beli pasir dan untuk mengetahui tentang tinjauan fiqih lingkungan terhadap akad jual beli pasir di Desa Banjar Talela.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif serta sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, pendekatan penelitian yuridis empiris, adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli pasir pantai di Desa Banjar Talela penjual belum memiliki izin dari pihak yang diberi kewenangan mengelola oleh Negara, sehingga menurut Hukum Islam jual beli pasir tersebut dipandang sebagai aspek-aspek jual beli yang di larang dalam hukum islam, dan Hukum Negara. Fiqih lingkungan Kerusakan alam yang disebabkan akibat penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia secara umum yaitu berdampak pada, perubahan garis pantai, rusaknya batu karang, rusaknya ekosistem pesisir, kenaikan volume air laut yang mengakibatkan tingginya gelombang pasang air laut, dan tingginya potensi terjadinya abrasi.

Kata kunci: jual beli, pasir pantai, Hukum Islam dan Hukum Negara.

ABSTRACT

With the practice of buying and selling sand in the middle of the beach which basically if viewed from a strategic point of view the land is already a very important asset. As the sand mining process is often not in accordance with procedures, the coastal areas owned by the State are recognized as belonging to the local population and the beach sand is traded. carry out sand mining that is not in accordance with Law No. 27 of 2007 as well as the Presidential regulation on reclamation. The sand mining is carried out continuously every day even though it is done ILLEGALLY. Because they are used to being the livelihood of the residents of Banjar Talela Village. Uncertain land ownership and unclear measurements are aspects of buying and selling which are prohibited in Islam, and state law. The formulation of the problem in this study is how the practice of buying and selling sand on the beach in Banjar Talela Village and how to review the Environmental Fiqih and Law Number 27 of 2007 concerning the management of coastal areas and small islands to the sale and purchase of sand on the beach of Banjar Talela Village. The purpose of this study is to find out about the sand buying and selling contract and to find out about environmental fiqih on the sand buying and selling contract in Banjar Talela Village.

The research method in this study uses qualitative methods and the nature of the research used is descriptive analytical, empirical juridical research approach, while the data sources used are primary data and secondary data with data collection techniques of observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that in the practice of buying and selling beach sand in Banjar Talela Village, the seller does not have permission from the party authorized to manage by the State, so that according to Islamic law the sale and purchase of sand is seen as aspects of buying and selling that are prohibited in Islamic law. , and State Law. Environmental jurisprudence Natural damage caused by sand mining carried out by humans in general has an impact on shoreline changes, damage to coral reefs, damage to coastal ecosystems, increased volume of sea water resulting in high tidal waves, and high potential for abrasion.

Keywords: buying and selling, beach sand, Islamic law and state law.